

ULANGAN HARIAN PPKn BAB 4 KELAS X

- g) mengeluarkan kebijakan wajib militer
C. mengangkat diplomat untuk ditempatkan di negara sahabat
D. membentuk tim ahli untuk memberantas teroris
E. merevisi peraturan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat
11. Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan negara lain hingga menghasilkan perjanjian luar negeri dalam bidang ekspor impor. Urusan pemerintahan pusat tersebut masuk ke dalam
A. pertahanan dan keamanan
B. perlindungan kesagamaan
C. politik luar negeri
D. moneter dan fiskal
E. yustisi
12. Penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul karena penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Hal itu sesuai dengan prinsip
A. eksternalitas D. strategis
B. akuntabilitas E. humanis
C. efisiensi
13. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah
A. UU No. 20 Tahun 2014
B. UU No. 21 Tahun 2014
C. UU No. 22 Tahun 2014
D. UU No. 23 Tahun 2014
E. UU No. 24 Tahun 2014
14. Perhatikan hal-hal berikut:
(1) penataan ruang hijau publik;
(2) sosialisasi transmigrasi;
(3) penertiban kawasan kumuh;
(4) pemberdayaan masyarakat nelayan;
(5) memberikan pelayanan kesehatan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar ditunjukkan nomor
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
15. Berikut ini bukan merupakan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang dalam otonomi khusus adalah Provinsi
A. Di Yogyakarta
B. DKI Jakarta
C. Aceh
D. Papua Barat
E. Gorontalo
16. Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Salah satu contohnya adalah
A. pengelolaan tata ruang diserahkan kepada negara
B. kewenangan kelembagaan pemerintah DIY ditentukan oleh pusat
C. kesultanan memiliki hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten
D. kebudayaan DIY menjadi patokan dalam pengembangan kebudayaan Nusantara
E. pemerintah pusat diberikan intervensi dalam pemilihan gubernur dan wakilnya
17. Sebuah daerah memiliki kebebasan dan kemandirian yang diartikan sebagai sebuah kemerdekaan yang membuat daerah tersebut bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kasus tersebut bertentangan dengan pengertian otonomi daerah menurut
A. Bakhtiar
B. Handoyo
C. J. Wajong
D. C. J. Franssen
E. Adeng Syarifuddin
18. Setelah pemekaran Provinsi Papua terdapat kelembagaan khusus

2021.12.03 09:58

representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Lembaga tersebut adalah

- A. Badan Musyawarah Kampung Papua
- B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
- C. Majelis Rakyat Papua
- D. Komunitas Lokal Papua
- E. Lembaga Otonomi Khusus Papua

19. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang kepala daerah adalah

- A. mengajukan rancangan perda
- B. menetapkan perda dan keputusan kepala daerah
- C. menyerahkan tugas sepenuhnya kepada kepala-kepala instansi
- D. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- E. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Perhatikan hal-hal berikut.

- (1) Menjalin kerja sama dengan pihak yang menguntungkan kepala daerah.
- (2) Melimpahkan tanggung jawab kepada seluruh jajaran instansi.
- (3) Menjaga norma dan etika dalam pelaksanaan pemerintahan.
- (4) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- (5) Melaksanakan program strategis nasional.

Kewajiban kepala daerah dan wakilnya ditunjukkan nomor

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (3), dan (5)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (2), (4), dan (5)
- E. (3), (4), dan (5)

21. Perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat

daerah serta pelayanan administratif adalah tugas

- A. Dewan Majelis Daerah
- B. Pimpinan Lembaga Daerah
- C. Sekretariat Daerah
- D. Inspektorat Daerah
- E. Dinas/Instansi Daerah

22. Instansi pemerintah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah adalah

- A. Sekretaris Daerah
- B. Inspektorat Daerah
- C. Dewan Perwakilan Daerah
- D. Badan Perencanaan Daerah
- E. Badan Pengelola Keuangan

23. Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan memiliki masa jabatan selama

- A. 3 tahun
- B. 4 tahun
- C. 5 tahun
- D. 6 tahun
- E. 7 tahun

24. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan merupakan tugas dari

- A. Kepala DPRD
- B. Wakil DPRD
- C. Sekretaris DPRD
- D. Sekretaris daerah
- E. Perangkat daerah

25. Indra adalah seorang kepala daerah. Suatu saat, ia tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk sementara waktu karena suatu hal. Orang yang dapat menggantikan Indra untuk sementara waktu adalah

- A. Kepala DPRD

- B. Wakil kepala DPRD
- C. Sekretaris daerah
- D. Wakil kepala daerah
- E. Pejabat yang ditunjuk oleh Mendagri

26. Kegiatan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur merupakan bentuk dan fungsi DPRD provinsi, yaitu

- A. pembentukan perda
- B. anggaran
- C. pengawasan
- D. pelaksanaan
- E. monitoring

27. Perhatikan hal-hal berikut.

- (1) Memilih gubernur dan wakil gubernur ketika terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan APBD provinsi.
- (3) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
- (4) Menyerahkan pembentukan perda kepada pusat.
- (5) Menghalangi persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Tugas dan wewenang DPR provinsi ditunjukkan pada nomor

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (3), dan (5)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (2), (4), dan (5)
- E. (3), (4), dan (5)

28. Seorang kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang dinilai merugikan petani. Oleh karena itu, DPRD melakukan penyelidikan terhadap kebijakan tersebut. Hak untuk menyelidiki yang dimiliki oleh DPRD provinsi tersebut dinamakan hak

- A. menyatakan pendapat
- B. interpelasi
- C. angket
- D. konstitusi
- E. veto

29. Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas

- A. sekretaris, alat kelengkapan lain yang dibentuk rapat paripurna, komisi
- B. badan anggaran, badan kehormatan, badan inspeksi
- C. komisi, badan anggaran, badan perencanaan
- D. pimpinan, anggota, dewan kehormatan
- E. pimpinan, badan musyawarah, komisi

30. DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan perda kabupaten/kota yang dilakukan dengan cara

- A. membahas bersama bupati atau walikota
- B. mengajukan usulan rancangan perda kabupaten/kota oleh DPRD ke pusat
- C. menyusun program pembentukan perda dengan bantuan pihak luar
- D. merencanakan implementasi perda
- E. membuat keputusan pelaksanaan perda

31. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota di kecamatan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dilaksanakan oleh

- A. wakil bupati
- B. sekretaris daerah
- C. kepala dinas
- D. camat
- E. lurah

32. Contoh dari implementasi fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD kabupaten/kota adalah

- A. menyusun program perda yang akan dibuat
- B. mencajut pelaksanaan perda
- C. mengawasi keamanan dan ketertiban daerah

- D. pembahasan anggaran dalam rapat APBD
E. mengawasi hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK
32. Jika terdapat kejadian yang luar biasa, DPRD berhak memberikan pendapat kepada gubernur dan merekomendasikan penyelesaiannya. Hak ini disebut hak
A. angket
B. interpellasi
C. eksekutif
D. menyatakan pendapat
E. prerogatif
34. Berikut ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota adalah
A. membentuk perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota
B. membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.
C. menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
D. memilih bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan
E. Peraturan yang mengatur pemilihan kepala daerah adalah
A. Undang-Undang No. 1 tahun 2015
B. Undang-Undang No. 2 tahun 2015
C. Undang-Undang No. 3 tahun 2015
D. Undang-Undang No. 4 tahun 2015
E. Undang-Undang No. 5 tahun 2015
36. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh
A. Presiden
B. Wakil presiden
C. DPRD
D. Gubernur
E. Menteri dalam negeri
37. Sebelum ditetapkan oleh gubernur, rancangan perda provinsi harus dievaluasi oleh
A. presiden
B. wakil presiden
C. DPR
D. menteri sekretaris negara
E. menteri dalam negeri
38. Penyusunan rancangan perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang negara. Jika bertentangan dengan negara, pihak yang bertugas untuk menindak adalah
A. aparat negara
B. DPRD
C. masyarakat
D. LSM
E. tokoh adat
39. Sejak menerima rancangan perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, rancangan perda kabupaten/kota disampaikan oleh walikota/bupati kepada gubernur paling lama yaitu
A. tiga hari
B. lima hari
C. tujuh hari
D. satu bulan
E. tiga bulan
40. Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan
A. Perdagub
B. Perkada
C. Pikada
D. Perdata
E. Pidana
41. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di kota madya adalah
A. presiden
B. gubernur
C. walikota
D. bupati
E. menteri keuangan
42. Berikut ini yang bukan merupakan hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah

berdasarkan Pasal 279 UU No. 23 Tahun 2014 adalah

- A. pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah
- B. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- C. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang
- D. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal)
- E. pemberian dana dari pihak swasta kepada pemerintah sebagai investor

43. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah

- A. presiden
- B. wakil presiden
- C. BPK
- D. DPRD
- E. menteri keuangan

44. Berikut yang tidak termasuk sumber pendapatan daerah adalah

- A. pendapatan dan pemanfaatan sebuah pantai yang sangat indah untuk tempat rekreasi umum
- B. pajak reklame sebuah minuman ringan
- C. pajak bumi dan bangunan
- D. retribusi terminal
- E. pajak sarang burung walet

45. Pelayanan kesehatan di daerah dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Fungsi pelayanan tersebut bersifat

- A. regional
- B. nasional
- C. lokal
- D. teritorial
- E. internasional

46. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah lebih cenderung menentukan kebijakan yang bersifat

- A. makro
- B. mikro
- C. sepihak
- D. komprehensif
- E. independen

47. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah harus berjalan sinergi dengan pola komunikasi yang baik. Tujuannya adalah

- A. menciptakan good government
- B. menciptakan kendali yang kuat dan pemerintah daerah
- C. memudahkan pengawasan terhadap penyelewengan pemerintah daerah
- D. menciptakan stabilitas keamanan dan keamanan
- E. menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah pusat

48. Pada daerah otonomi, hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bersifat

- A. sentralisasi
- B. desentralisasi
- C. mikro
- D. makro
- E. kolonisasi

49. Daerah diberi kesempatan untuk membentuk perangkat-perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu

- A. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- B. 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- C. 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- D. 21 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- E. 22 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

50. Adanya pendistribusian wewenang atau urusan digunakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, tercapai kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip

- A. eksternalitas
- B. akuntabilitas
- C. efisiensi
- D. efektivitas
- E. kompetensi

2021.02.03 09:59